42-54_plagiasi.docx

by 120 UMY

Submission date: 14-Mar-2026 11:25AM (UTC+0700)
Submission ID: 2854729441
File name: 42-54_plagiasi.docx (5.8M)
Word count: 6096
Character count: 42225

Praktik Perlindungan Sosial Pekerja Informal di Perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste

***Dewi Puspita Rahayu[1], Tamara Adelia Nainggolan[2], Mafatikhul Huda[3], Raffael Lois Rudtyanto[4]**

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi praktik perlindungan sosial bagi pekerja informal di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, dengan fokus pada petani di Desa Kabuna, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Masalah utama yang dihadapi pekerja informal meliputi ketidakpastian ekonomi, akses terbatas terhadap layanan sosial, dan kondisi geografis yang sulit. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perlindungan sosial formal dan informal yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan pekerja informal di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial di wilayah perbatasan membentuk pola *hybrid* yang adaptif, yaitu kombinasi antara skema formal seperti BPJS dan mekanisme informal berbasis komunitas seperti gotong royong, diversifikasi pendapatan, serta investasi ternak sebagai bentuk *self-insurance*. Rendahnya partisipasi dalam skema formal dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, minimnya sosialisasi, dan karakter pendapatan musiman. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa pekerja informal di wilayah perbatasan tidak hanya mengalami eksklusi, tetapi juga membangun strategi adaptif dalam menghadapi ketidakpastian. Temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran kebijakan dari bantuan konsumtif menuju dukungan produktif yang lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas perbatasan.

Kata Kunci: Perlindungan Sosial; Jaminan Sosial; Pekerja Informal; Masyarakat Perbatasan

Abstract

This study explores social protection practices for informal workers in the Indonesia–Timor Leste border area, focusing on farmers in Kabuna Village, Belu Regency, East Nusa Tenggara. Informal workers in this region face economic uncertainty, limited access to social services, and challenging geographical conditions. The research aims to understand the dynamics of existing formal and informal social protection mechanisms and identify the challenges and needs of informal workers in the border area. This study employs a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings show that social protection in the border context forms an adaptive hybrid pattern, combining formal schemes such as BPJS with informal community-based mechanisms, including mutual assistance, income diversification, and livestock investment as a form of self-insurance. Low participation in formal social security programs is influenced by economic constraints, limited outreach, and seasonal income patterns. The study contributes theoretically by showing that informal workers in border regions not only experience exclusion from state protection systems but also develop adaptive strategies to manage economic uncertainty. These findings highlight the need to shift policy approaches from consumptive assistance toward more productive support for border communities.

Keywords: *Social Protection; Social Security; Informal Workers; Border Communities*

PENDAHULUAN

Perlindungan sosial merupakan fondasi struktural dalam menjamin ketahanan sosial-ekonomi masyarakat terhadap risiko siklus hidup, ketidakpastian pendapatan, serta krisis multidimensi seperti perubahan iklim. International Labour Organization (ILO) melalui *World Social Protection Report 2024–2026* menegaskan bahwa meskipun cakupan global telah meningkat hingga 52,4% populasi dunia, sekitar 3,8 miliar orang masih sepenuhnya tidak terlindungi oleh manfaat perlindungan sosial apa pun (International Labour Organization, 2024). Laporan tersebut juga menekankan bahwa tanpa sistem perlindungan sosial yang universal, memadai, dan berkelanjutan secara pembiayaan, krisis iklim dan ketidakpastian ekonomi akan memperdalam kemiskinan,

memperluas ketimpangan, serta meningkatkan kerentanan sosial.

Praktik perlindungan sosial di Indonesia secara formal sudah tercermin dalam berbagai kebijakan dan program bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara untuk bantuan sosial yang bersifat tunai, Indonesia memiliki program-program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), kartu prakerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Kementerian Keuangan, 2022). Selain dalam wujud bantuan sosial, praktik perlindungan sosial di Indonesia juga dikembangkan dalam bentuk asuransi sosial yang dikelola oleh pemerintah yaitu melalui lembaga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 24 Tentang BPJS, 2011). Secara nasional, cakupan perlindungan sosial formal menunjukkan skala yang luas, dengan jutaan rumah tangga menerima bantuan sosial dan lebih dari 98% penduduk telah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan, 2025).

Studi mengenai sistem perlindungan sosial Indonesia menunjukkan bahwa meskipun cakupan perlindungan sosial formal terus diperluas melalui berbagai program nasional, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam menjangkau kelompok rentan, khususnya pekerja sektor informal dan kelompok yang berada dalam kategori "*missing middle*", yakni mereka yang tidak tergolong miskin ekstrem tetapi memiliki kerentanan tinggi terhadap guncangan ekonomi dan perubahan lingkungan (Surtiari et al., 2024). Dalam konteks perubahan iklim dan ketidakpastian sosial-ekonomi yang semakin meningkat, tekanan terhadap sistem perlindungan sosial formal semakin besar sehingga menuntut cakupan yang lebih luas dan adaptif. Kondisi ini mendorong berkembangnya mekanisme perlindungan sosial yang dibangun secara *bottom-up* oleh komunitas sebagai respons terhadap keterbatasan perlindungan formal. Solidaritas keluarga dan jaringan sosial sering kali menjadi jaring pengaman pertama ketika individu atau rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi maupun risiko sosial. Penelitian Warham & Lestari (2025) menunjukkan bahwa praktik gotong royong dalam komunitas sektor informal berfungsi sebagai modal sosial ekonomi yang memungkinkan terjadinya berbagi sumber daya, dukungan finansial, dan penguatan stabilitas pendapatan rumah tangga. Selain itu, penelitian Istianah & Imelda (2021) menunjukkan bahwa ketika perlindungan sosial formal tidak sepenuhnya mencukupi, kelompok rentan membangun mekanisme perlindungan sosial informal melalui donasi antar anggota komunitas dan pinjaman berbasis relasi keluarga sebagai bentuk respons adaptif terhadap keterbatasan struktural.

Dari serangkaian praktik perlindungan sosial yang terjadi di Indonesia, praktik perlindungan sosial bagi para pekerja informal di Indonesia perlu mendapatkan perhatian lebih karena masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada November 2025, penduduk bekerja di sektor informal sebanyak 85,35 juta orang (57,70%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 62,57 juta orang (42,30%) (Badan Pusat Statistik, 2026). Persentase menunjukkan jumlah tenaga kerja di sektor informal menempati posisi tertinggi jika dibandingkan dengan tenaga kerja sektor formal. Namun demikian, hanya sekitar 11% pekerja informal yang terlindungi jaminan sosial formal (BPJS Ketenagakerjaan, 2025). Dalam konteks ini, praktik perlindungan sosial informal sering kali lebih 'bermain' dan berkisar pada jejaring solidaritas komunitas, di mana mereka saling memberikan dukungan finansial atau non-finansial dalam situasi kebutuhan. Selain itu, perkumpulan kerja sektor informal dan organisasi non-pemerintah turut berperan dalam memberikan informasi, pelatihan, dan advokasi untuk meningkatkan kondisi kerja dan akses terhadap hak-hak pekerja. Meskipun ada upaya-upaya ini, tantangan yang signifikan ada pada kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan.

Berkaitan dengan hal di atas, praktik perlindungan sosial bagi para pekerja informal di

wilayah perbatasan Indonesia merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan unik yang dihadapi oleh komunitas tersebut. Wilayah perbatasan seringkali memiliki kondisi ekonomi yang lebih sulit, akses terbatas terhadap layanan publik, dan ketidakpastian terkait dengan dinamika geopolitik. Demikian juga yang terjadi di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL). Masyarakat eks pengungsi Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih mengalami eksklusi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Sejak konflik sebelum dan sesudah referendum pada 30 Agustus 1999, terdapat 450.000 korban konflik referendum. Sebanyak 240.000 korban merupakan pengungsi lintas batas yang bermigrasi ke Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur), dan 210.000 korban lainnya mengalami eksklusi sosial politik di wilayah Timor Timur dan digolongkan sebagai pengungsi internal atau *Internally Displaced Persons* (IDPs) (Maksum et al., 2020). Kondisi eksklusi sosial yang disebutkan Maksum terbukti masih terjadi dan dikonfirmasi oleh penelitian terbaru. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Vidhyandika D. Perkasa dari UGM pada Juni 2024 di Desa Sadi dan Desa Silawan, Kabupaten Belu menemukan bahwa eks pengungsi Timor-Timur terus hidup dalam kemiskinan meskipun secara hukum telah diakui sebagai WNI sejak 1999/2000. Penelitian ini menunjukkan adanya masalah sosial berupa akses tanah, masalah ekonomi dan pendidikan, serta komodifikasi ekonomi dan politik, di mana pemisahan pemukiman eks Timor Timur dari penduduk lokal menyebabkan penguatan identitas dan segregasi sosial kelompok yang mengarah pada eksklusifitas dalam proses sosial (Perkasa et al., 2024). Di mana hal ini sejalan dengan data BPS Indonesia yang menunjukkan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Provinsi NTT pada 2025 sebesar 18,06% (BPS Provinsi NTT, 2025), jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 6,73% pada Maret 2025.

Kondisi-kondisi tersebut tentu saja mempengaruhi praktik perlindungan sosial masyarakat eks pengungsi terlebih lagi bagi mereka yang bekerja di sektor informal di mana sektor ini pada dasarnya memiliki tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Praktik perlindungan sosial di wilayah perbatasan mungkin saja melibatkan solidaritas lokal dan gotong-royong komunitas, di mana masyarakat setempat berusaha saling mendukung dalam situasi ekonomi sulit atau krisis. Selain itu, organisasi masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, atau koperasi lokal, dapat memainkan peran penting dalam memberikan bantuan, pelatihan, dan sarana pengembangan ekonomi. Namun, tantangan utama melibatkan ketidakpastian pekerjaan, akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketidakamanan di wilayah perbatasan.

Penelitian mengenai praktik perlindungan sosial para pekerja informal di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste (RI-RDTL) diarahkan untuk memahami bentuk, dinamika, tantangan, dan potensi solusi dalam konteks geografis dan sosial yang unik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi, menganalisis praktik perlindungan sosial formal dan informal yang diakses pekerja informal di wilayah perbatasan RI–RDTL, serta menilai efektivitas dan aksesibilitas layanan perlindungan sosial yang tersedia.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan sosial dalam literatur kontemporer dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang bertujuan mengurangi kerentanan dan menjamin stabilitas kesejahteraan dalam menghadapi berbagai risiko sosial-ekonomi. Menurut International Labour Organization (ILO) perlindungan sosial merujuk pada seperangkat kebijakan dan program publik yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko siklus hidup dan guncangan sosial-ekonomi, melalui jaminan pendapatan dan akses terhadap layanan kesehatan, guna mencegah kemiskinan, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat (International Labour Organization, 2024).

ILO menekankan bahwa perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap

kemiskinan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko baru, termasuk risiko yang dipicu oleh perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam kerangka ILO, perlindungan sosial diposisikan sebagai sistem berbasis hak yang menjamin keamanan pendapatan dan akses layanan kesehatan guna melindungi individu dari risiko sosial-ekonomi sepanjang siklus hidup (International Labour Organization, 2024).

Lebih lanjut, ILO menempatkan perlindungan sosial sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi. Perlindungan sosial menyediakan dasar pendapatan *(income floor),* akses layanan kesehatan, serta mendukung diversifikasi penghidupan yang memungkinkan rumah tangga menghadapi dan pulih dari guncangan. (International Labour Organization, 2024). Dalam kerangka ini, perlindungan sosial tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan promotif dalam memperkuat ketahanan (*resilience*) individu, rumah tangga, dan komunitas.

Scott menyebutkan bahwa program perlindungan sosial yang paling umum mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, intervensi pasar tenaga kerja, dan program komunitas/informal. Terdapat 2 klasifikasi program perlindungan sosial yakni program bantuan sosial (*social assistance*) dan program jaminan sosial (*social insurance*) (Ginneken, 1999).

Howell menjelaskan bahwa Asian Development Bank mendefinisikan bantuan sosial sebagai program yang dirancang untuk membantu individu, rumah tangga, dan komunitas paling rentan untuk memenuhi dan meningkatkan standar hidupnya. Sedangkan Department for International Development mendefinisikan bantuan sosial sebagai pemberian kepada masyarakat yang rentan atau miskin tanpa sistem iuran dari penerima manfaatnya. Bantuan ini dapat berupa transfer dana sosial sampai beberapa bentuk lainnya seperti pembebasan pembayaran layanan pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya menurut Chu dan Gupta, *International Monetary Fund* (IMF) mendefinisikan bantuan sosial sebagai alat yang bertujuan untuk memitigasi dampak negatif perubahan keadaan masyarakat yang tergolong miskin (Grosh et al., 2018).

Sedangkan jaminan sosial adalah suatu bentuk pengurangan risiko melalui bantuan pendapatan dan/atau pertanggungan pengeluaran apabila terjadi sakit, kecelakaan kerja, kelahiran, hari tua, dan kematian. Jaminan sosial pada umumnya menggunakan prinsip asuransi sosial, yaitu didasarkan pada mekanisme saling berbagi resiko dalam suatu kelompok penduduk yang memiliki tingkat risiko yang heterogen, di mana penduduk wajib menjadi peserta dan berkontribusi dengan membayar premi. Dengan kata lain, penanganan risiko dihadapi secara gotong royong oleh para pesertanya melalui pengelolaan dana pertanggungan yang dikumpulkan dari kontribusi premi. Jaminan Sosial biasanya mensyaratkan peserta memiliki sumber pendapatan yang relatif stabil dan sebagian dapat disisihkan untuk membayar premi. Hak peserta atas asuransi sosial dijamin berdasarkan data pembayarannya.

Penelitian-penelitian terkait perlindungan sosial bagi pekerja informal di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang berfokus pada tingkat kepesertaan dan determinan partisipasi dalam program jaminan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadi et al. (2025) misalnya, lebih menitikberatkan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepesertaan pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas pekerja formal untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan 29,11 kali lebih tinggi dibandingkan pekerja informal. Tingkat partisipasi pekerja informal bahkan hanya sekitar 1%, jauh tertinggal dibandingkan pekerja formal yang mencapai lebih dari 40%. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pendapatan, lokasi tempat tinggal (*urban–rural*), dan sektor pekerjaan merupakan faktor utama yang memengaruhi partisipasi pekerja informal. Pekerja informal di sektor pertanian dan wilayah perdesaan memiliki tingkat kepesertaan paling rendah, terutama karena keterbatasan pendapatan dan akses informasi

(Ngadi et al., 2025). Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan adanya bias struktural dalam sistem jaminan sosial berbasis kontribusi yang lebih kompatibel dengan pekerja formal.

Selain itu, penelitian oleh Surtiari et al. (2024) mengenai sistem perlindungan sosial Indonesia dalam konteks adaptasi terhadap perubahan iklim menjelaskan bahwa cakupan perlindungan sosial formal masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pekerja informal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga pekerja informal masih sangat bergantung pada mekanisme perlindungan sosial informal seperti jaringan kekerabatan, solidaritas komunitas, dan kepemilikan aset produktif sebagai strategi menghadapi guncangan ekonomi dan risiko produksi. Perlindungan sosial dipahami tidak hanya sebagai skema formal berbasis kontribusi, tetapi sebagai sistem yang lebih luas yang memperkuat kapasitas adaptif dan ketahanan rumah tangga terhadap ketidakpastian pendapatan (Surtiari et al., 2024). Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai relasi antara perlindungan sosial dan ketahanan ekonomi, khususnya dalam menghadapi risiko struktural.

Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai rendahnya partisipasi pekerja informal serta peran mekanisme informal dalam menjaga ketahanan rumah tangga, kajian yang ada masih berfokus pada persoalan determinan kepesertaan dan adaptasi dalam skala umum. Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara spesifik mengkaji praktik perlindungan sosial baik bentuk formal maupun informal pada pekerja informal pertanian di wilayah perbatasan, dengan karakteristik kerentanan struktural yang berbeda dibandingkan wilayah non-perbatasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti tingkat partisipasi, tetapi juga menganalisis bagaimana perlindungan sosial beroperasi dalam konteks sosial-ekonomi dan geografis yang khas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi praktik perlindungan sosial di Desa Kabuna secara holistik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, *in-depth interview*, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pekerja informal di sektor pertanian yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengurus kelompok tani dan petani anggota. Pemilihan kedua kategori ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai praktik perlindungan sosial di tingkat komunitas. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kabuna, Kabupaten Belu. Alasannya adalah Desa Kabuna merupakan wilayah perbatasan yang didiami oleh eks pengungsi Timor-Timur yang memiliki kerentanan sosial tertentu, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi perlindungan sosial.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles and Huberman, dengan tahapan meliputi kondensasi data untuk memilah, memfokuskan dan mengatur data wawancara, dokumentasi, dan observasi, lalu penyajian data yang mencakup paragraf deskriptif dan tabel, serta penarikan kesimpulan dimana data yang telah disajikan dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep yang berkaitan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Ketidakpastian Jaminan Sosial

Desa Kabuna di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh potret kehidupan masyarakat pedesaan yang sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama dalam bertahan hidup. Sebagian besar masyarakat Desa Kabuna bekerja sebagai petani maupun buruh tani. Biasanya warga menggarap lahan seluas 50 hingga 100 are untuk 3-4 orang. Pertanian di Desa Kabuna dijalankan secara tradisional, dengan mayoritas pekerja memperoleh keterampilan bertani dari pengalaman turun-temurun.

Pendapatan masyarakat Kabuna yang masih sangat bergantung pada sektor informal seperti

pertanian membuat posisi masyarakat selalu berada diambang ketidakpastian. Hasil panen yang masih bergantung pada faktor cuaca di wilayah tersebut membuat masyarakat memiliki penghasilan yang tidak pasti. Ketika cuaca panas masyarakat hanya bisa menanam tanaman sayur dengan penghasilan yang juga bergantung dengan harga pasar. Sayuran seperti kacang panjang, bunga kol, cabai, tomat, dan bawang menjadi pilihan dari masyarakat untuk ditanam ketika cuaca panas tiba. Berbeda ketika musim hujan tiba, masyarakat akan beralih ke sektor pertanian dengan menanam padi. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengurus kelompok tani:

> "*Kami di sini kalau musim panas begini kami tanam sayur, tapi kalau musim hujan tempat sayur kami pakai tanam padi… Kami tunggu hujan dulu baru bisa tanam padi*." (Wawancara, 26 Juni 2024).

Dengan harga yang relatif murah, masyarakat Desa Kabuna selalu dihadapkan pada situasi yang dilematis karena penjualan hasil panen di pasar tidak serta merta memberikan keuntungan sesuai yang diharapkan. Pendapatan yang tidak menentu tersebut diperparah dengan perbedaan kepemilikan luas lahan dari masing-masing individu di Desa Kabuna. Tidak jarang terdapat masyarakat yang menggarap lahan secara bersama karena tidak memiliki lahan yang cukup luas sehingga ketika hasil panenan sudah terjual, keuntungan yang didapat masih harus dibagi sesuai dengan jumlah penggarap yang ada. Situasi ini mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas yang baik diantara masyarakat Desa Kabuna.

Namun di sisi lain juga mempersulit kesempatan dari masyarakat Desa Kabuna untuk memperoleh keuntungan yang pasti. Kenyataan tersebut mencerminkan adanya hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Kabuna dalam menjalankan aktivitas pertanian di daerah perbatasan Indonesia. Dalam realitasnya, hambatan yang dialami oleh para petani di Desa Kabuna lebih kompleks dan beragam bentuknya seperti akses yang sulit terhadap bahan pertanian seperti pupuk dan bibit tanaman yang hendak dikelola, proses tanam yang harus menyesuaikan dengan cuaca apalagi di musim kemarau sangat rentan terhadap kekeringan. Kemudian, adanya serangan hama pada waktu tertentu yang tentu saja merugikan perolehan hasil panen yang diharapkan oleh masyarakat. Hambatan yang lain adalah kemampuan dan kepemilikan modal yang berbeda antar individu sehingga mempengaruhi sistem pengelolaan pertanian. Hal tersebut juga menjadi salah satu hambatan baru karena muncul kesenjangan sosial antar masyarakat. Selain itu, minimnya edukasi dan sosialisasi terkait langkah pencegahan gagal panen juga masih terbatas sehingga secara tidak langsung dapat menciptakan sebuah kesenjangan baru akibat tidak meratanya edukasi pertanian kepada seluruh masyarakat Desa Kabuna. Edukasi dan sosialisasi yang masif sejatinya dapat menjadi sebuah langkah solutif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Kabuna dalam menjalankan usaha pertaniannya, namun karena keterbatasan yang ada proses edukasi tidak dapat berjalan dengan mudah.

Hambatan lain yang paling sering dialami oleh masyarakat Desa Kabuna dan kebanyakan petani yang lain adalah fluktuasi harga di pasar. Harga yang ada di pasaran tidak menentu tergantung permintaan dan penawaran yang ada mengakibatkan keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat Desa Kabuna cenderung tidak stabil. Keseragaman jenis tanaman saat musim tertentu memicu banjir pasokan yang menjatuhkan harga jual di tingkat petani. Dengan masa tanam dan panen yang hampir bersamaan, pasokan bahan makanan yang dijual di pasar juga akan meningkat. Hal ini tentu menjadi masalah apabila faktor permintaan relatif sama sehingga harga jual di pasar ikut menurun. Kurangnya bantuan dari pemerintah dan kebijakan yang seimbang untuk memeratakan cakupan pasar juga menjadi faktor pendukung harga di pasar cenderung tidak stabil dan berdampak pada kerugian dari para petani termasuk masyarakat Desa Kabuna.

Fluktuasi harga yang terjadi di pasar tersebut mendorong masyarakat Desa Kabuna kepada situasi yang tidak pasti dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan harga yang seringkali tidak terduga memberikan dampak langsung kepada

masyarakat dalam menyusun perencanaan keungan harian maupun jangka panjang. Pemenuhan kebutuhan pokok sebagian masyarakat Desa Kabuna juga belum maksimal dikarenakan pendapatan yang tidak stabil. Ketidakpastian tersebut tentu mempengaruhi aspek sosial masyarakat di mana bisa terjadi kecemasan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

Praktik Perlindungan Sosial di Desa Kabuna

Masyarakat Desa Kabuna memiliki berbagai cara dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi, baik melalui program perlindungan sosial formal yang disediakan oleh pemerintah maupun mekanisme informal berbasis komunitas. Pola ini sejalan dengan laporan International Labour Organization (2021) dalam *World Social Protection Report 2020–22* yang menegaskan bahwa di banyak negara berkembang, khususnya pada sektor informal dan wilayah pedesaan, sistem perlindungan sosial masih bersifat parsial sehingga rumah tangga tetap bergantung pada solidaritas komunitas. Dengan demikian, perlindungan sosial di tingkat desa cenderung bersifat komplementer antara skema negara dan mekanisme berbasis komunitas.

Praktik perlindungan sosial di Kabuna juga perlu dilihat dalam konteks masih rendahnya cakupan perlindungan sosial formal bagi pekerja informal di Indonesia. Kondisi ini penting sebagai latar untuk memahami mengapa masyarakat di wilayah perbatasan cenderung mengembangkan strategi perlindungan sosial yang tidak hanya bergantung pada skema formal negara.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, Agustus Tahun 2025

Nama Data	Aktif	Non Aktif
Penerima Upah	26.642.566	19.308.455
Jasa Konstruksi	4.393.048	-
Bukan Penerima Upah	9.962.568	1.352.601

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan data diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa cakupan jaminan sosial formal bagi pekerja informal masih sangat terbatas, dengan tingkat kepesertaan sekitar 11%. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan di Kabuna, di mana perlindungan sosial formal belum menjadi tumpuan utama, sehingga masyarakat lebih banyak mengandalkan mekanisme perlindungan sosial yang tumbuh dari relasi keluarga, komunitas, dan strategi ekonomi rumah tangga.

Program perlindungan sosial formal yang paling dikenal petani Desa Kabuna adalah BPJS Kesehatan. Namun, partisipasi masih relatif rendah, terutama karena skema iuran mandiri dianggap memberatkan ketika pendapatan pertanian tidak stabil. Iuran ini sering kali dianggap membebani, terutama ketika pendapatan mereka berkurang akibat hasil panen yang tidak mencukupi. Temuan ini konsisten dengan studi Agustina et al. (2019) yang menjelaskan bahwa pekerja sektor informal di Indonesia menghadapi tantangan utama berupa kemampuan membayar iuran dan ketidakteraturan pendapatan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, minimnya akses ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS juga menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan maksimal.

Selain BPJS Kesehatan, beberapa warga juga terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan meskipun jumlah jauh lebih sedikit. Program ini biasanya diikuti oleh perangkat desa atau warga yang memiliki usaha, seperti pemilik warung atau peternak dengan skala besar. Minimnya pemahaman tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan, ditambah dengan biaya iuran yang dianggap tinggi membuat program ini kurang diminati oleh mayoritas petani kecil di Desa Kabuna.

Selain itu, masyarakat Desa Kabuna juga menerima bantuan sosial dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima oleh sebagian masyarakat selama pandemi COVID-19. Bantuan ini dirasa sangat membantu bagi keluarga yang sangat bergantung pada pendapatan hasil pertanian. Namun, distribusi bantuan sering kali tidak merata yang menyebabkan beberapa masyarakat merasa bahwa program-program ini lebih bersifat sementara daripada memberikan solusi jangka panjang. Kondisi ini sejalan dengan temuan dinamika implementasi kebijakan sosial

DBHCHT yang menunjukkan adanya persoalan ketidaksinkronan regulasi dan ketergantungan pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga bantuan tidak sepenuhnya menjangkau kelompok sasaran utama (Haliim & Wicaksono, 2025).

Selain jaminan formal dari pemerintah, perlindungan sosial informal juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Kabuna. Gotong royong adalah salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Ketika salah satu anggota masyarakat menghadapi kesulitan, seperti gagal panen atau kebutuhan mendesak, tetangga dan kerabat sering kali memberikan bantuan berupa uang, tenaga, atau hasil panen. Hal ini memperlihatkan kuatnya nilai-nilai solidaritas dan kekerabatan dalam komunitas pedesaan. Selain gotong royong, tabungan pribadi dan investasi dalam bentuk ternak juga menjadi strategi dalam perlindungan sosial informal. Hewan ternak seperti babi, ayam, dan sapi sering dijadikan "tabungan hidup" yang dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Misalnya, seorang petani yang memiliki beberapa ekor babi dapat menjual salah satu ternaknya untuk membiayai pengobatan atau membeli pupuk untuk pertaniannya.

Kelompok tani juga memainkan peran dalam mendukung perlindungan sosial informal. Selain menjadi wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman, kelompok tani juga membantu anggotanya mengelola risiko secara kolektif. Studi mengenai kelembagaan pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa organisasi lokal seperti kelompok tani dapat meningkatkan kapasitas adaptif petani melalui koordinasi dan akses program (Syahyuti, 2018). Kelompok tani berfungsi sebagai tempat untuk saling membantu dalam menghadapi masalah teknis, seperti serangan hama atau kekeringan. Partisipasi masyarakat dalam program sosial menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Program Keluarga Harapan yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif sasaran program (Putri, 2024). Dalam beberapa hal, kelompok tani bahkan menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah dalam mengakses bantuan atau program perlindungan sosial formal. Meskipun perlindungan sosial informal telah membantu masyarakat Desa Kabuna bertahan di tengah berbagai tantangan, hal ini memiliki keterbatasan. Bantuan yang diberikan oleh tetangga atau kerabat sering kali hanya bersifat sementara dan dalam skala kecil.

Kebutuhan Pekerja di Wilayah Perbatasan

Kondisi ketidakstabilan perekonomian warga yang bekerja di sektor informal terkhusus mereka yang bermata pencaharian sebagai petani menunjukkan tingginya kerentanan terhadap guncangan harga, keterbatasan input produksi, dan ketidakpastian pendapatan. Dalam literatur Indonesia, pekerja informal pedesaan kerap berada dalam situasi *vulnerable employment*, yaitu bekerja tanpa kepastian pendapatan dan tanpa perlindungan sosial memadai (Suryahadi et al., 2020).

Adanya subsidi bahan pokok, bantuan langsung tunai, maupun program-program kartu sembako merupakan beberapa contoh dari jaminan sosial yang menjadi penopang utama bagi masyarakat Desa Kabuna yang dikelilingi dengan berbagai situasi yang tidak pasti. Melalui berbagai bentuk jaminan sosial yang ada, setidaknya masyarakat dapat sedikit bernapas untuk tetap memenuhi kebutuhan dasarnya meskipun situasi yang dialami tidak menentu seperti fluktuasi harga di pasar. Namun, berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan memperlihatkan situasi yang berbeda. Kebanyakan masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap jaminan sosial sehingga tidak banyak yang memiliki jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah seperti BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Implementasi program jaminan sosial oleh pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat berjalan dengan baik pada masyarakat Desa Kabuna karena minimnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kehadiran jaminan sosial. Dalam konteks implementasi kebijakan di tingkat desa, kualitas komunikasi dan partisipasi masyarakat menjadi

faktor penentu efektivitas program, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian pengelolaan BUMDes yang menegaskan bahwa rendahnya keterlibatan masyarakat dapat menghambat keberlanjutan kebijakan (Muchlis et al., 2025). Berdasarkan data yang diperoleh masyarakat cenderung tidak mengetahui tentang mekanisme dari program jaminan sosial tersebut. Proses sosialisasi yang kurang juga diperparah dengan beberapa tantangan dalam menyediakan program jaminan sosial bagi masyarakat seperti kriteria yang harus dipenuhi, prosedur administrasi yang rumit, dan iuran bulanan yang tidak semua masyarakat dapat membayarkannya. Kondisi tersebut menciptakan kerentanan dan kecenderungan adanya masyarakat yang terabaikan oleh pemerintah sehingga masyarakat Desa Kabuna yang bekerja di sektor informal berada di situasi pemenuhan kebutuhan dasar yang terbatas. Akses informasi yang terbatas menyebabkan keikutsertaan masyarakat Desa Kabuna dalam program BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, masyarakat Desa Kabuna yang berpartisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka yang tergabung sebagai perangkat desa atau bekerja di instasi pemerintahan desa. Tentunya hal ini menjadi sebuah realita yang cukup memprihatinkan mengingat kondisi sebagian besar masyarakat Desa Kabuna sebagai pekerja informal yang rentan terhadap ancaman kemiskinan dan ketidakpastian pemenuhan kebutuhan di wilayah perbatasan.

Aksesibilitas dan Efektivitas Layanan Perlindungan Sosial yang Ada

Pada masyarakat Desa Kabuna khususnya petani sebagai pekerja di sektor informal tentunya banyak mengalami dinamika dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang petani. Perlindungan sosial menjadi penting bagi mereka akan ketidakpastian ekonomi dan kehidupan, apalagi ditambah dengan lokasi geografis mereka sebagai eks pengungsi yang tinggal di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL). Berdasarkan kerentanan yang dialami petani untuk kehidupan dan masa depannya, memiliki perlindungan sosial menjadi hal yang krusial.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial ini sendiri harus dimiliki terlebih dulu oleh para petani. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan diketahui bahwa para petani sendiri sudah memiliki kesadaran akan pentingnya suatu jaminan untuk meminimalisir resiko sosial seperti apabila ada musibah melanda keluarga, berjaga-jaga saat sakit, adanya ketakutan program kesehatan Pemerintah Belu ditarik secara tiba-tiba dan berjaga-jaga untuk hal-hal tidak terduga lainnya di masa depan.

Akan tetapi, kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial pada para petani ini tidak serta merta diikuti dengan kesadaran akan kepesertaan pada asuransi sosial. Jenis asuransi sosial yang dimiliki sangat bergantung pada tingkat ekonomi petani. Untuk petani dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, asuransi yang dimiliki umumnya berasal dari pemerintah seperti BPJS, Jamkesmas, dan juga program kesehatan gratis dari Pemerintah Kabupaten Belu. Selain itu, terdapat informan yang bahkan belum mengetahui terkait apa itu asuransi sosial. Hal ini didukung melalui studi empiris terhadap pekerja informal peserta JKN menemukan bahwa keputusan untuk tetap membayar iuran sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga, persepsi terhadap manfaat layanan, serta pengalaman administratif yang dirasakan (Muttaqien et al., 2021). Dengan demikian, hambatan partisipasi tidak dapat direduksi pada rendahnya kesadaran, melainkan berkaitan erat dengan keterbatasan struktural dan desain kebijakan.

Selanjutnya untuk petani dengan tingkat ekonomi menengah ke atas umumnya sudah mengenal terkait asuransi dan sudah tergabung seperti pada BPJS Ketenagakerjaan dan mengikuti asuransi swasta. Artinya, aksesibilitas terhadap jaminan perlindungan sosial masih belum merata tergantung pada tingkat ekonomi yang dimiliki para petani. Hal ini karena pada beberapa petani masih mengalami kesulitan finansial yang mempengaruhi modal untuk mengelola pertanian. Ketika petani bahkan tidak memiliki modal untuk pengelolaan

pertaniannya, tentunya menjadi hal yang sulit baginya dalam mengakses jaminan perlindungan sosial.

Ketimpangan akses terhadap BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan di Desa Kabuna memperlihatkan pola stratifikasi berdasarkan tingkat ekonomi. Petani dengan kondisi ekonomi lebih baik cenderung memiliki akses terhadap asuransi sosial dan bahkan asuransi swasta, sedangkan petani ekonomi menengah ke bawah lebih bergantung pada program bantuan pemerintah atau bahkan tidak memiliki perlindungan sama sekali. Fenomena ini mencerminkan karakter sistem kontributif yang kurang adaptif terhadap pekerja berpendapatan musiman. Studi mengenai kepatuhan pembayaran peserta mandiri JKN juga menunjukkan bahwa ketidakstabilan pendapatan merupakan faktor dominan yang menyebabkan tunggakan atau penghentian kepesertaan (Muttaqien et al., 2021).

Bentuk atau mekanisme jaminan sosial yang lebih banyak dipraktikkan oleh petani di Desa Kabuna adalah bersifat formal dengan cara berelasi langsung dengan lembaga jaminan sosial atau keuangan. Umumnya para petani melakukan pinjaman pada lembaga keuangan yaitu Bank BRI dengan skema KUR. Praktik perlindungan sosial secara informal kurang dilakukan oleh masyarakat karena nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat tidak mendukung terselenggaranya praktik jaminan sosial secara informal tersebut. Pada masyarakat Desa Kabuna, meskipun memiliki relasi saudara atau teman karib, tidak serta merta membuat para petani ini mau meminjam pada keluarga dikarenakan harus membayar dengan bunga yang besar. Sehingga para petani lebih memilih untuk melakukan pinjaman ke bank daripada kepada saudara, tetangga atau temannya atau dari rekan kelompok tani.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kebanyakan petani hanya bergantung pada jaminan sosial yang berasal dari pemerintah. Bantuan-bantuan pada petani juga hanya berasal dari pemerintah seperti pemberian pompa air, perpipaan, BLT, bibit, obat-obatan untuk semprot hama, dan plastik mursa. Dari pihak swasta ataupun LSM sendiri tidak ada bantuan yang ditujukan pada para petani ini.

Berdasarkan identifikasi hambatan yang dialami oleh petani, diketahui bahwa para petani ini lebih membutuhkan bantuan sosial yang sifatnya dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka daripada bantuan yang bersifat konsumtif. Seluruh informan secara kompak menjawab bahwa dalam hal pertanian mereka lebih membutuhkan bantuan yang mendukung kegiatan pertanian seperti bibit-bibitan, obat pestisida, mesin air ataupun traktor dibandingkan dengan bantuan dalam bentuk uang. Hal ini menunjukkan semangat bekerja yang tinggi oleh para petani dan tidak mau berpangku pada bantuan uang. Artinya, para petani memiliki pemikiran untuk menuju kemandirian pertaniannya sendiri. Orientasi pada kemandirian ini sejalan dengan temuan bahwa keberlanjutan program ekonomi desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat serta kesadaran kolektif dalam mengelola sumber daya lokal (Muchlis et al., 2025).

Pemerintah mungkin telah memberikan subsidi berupa pupuk dan alat-alat pertanian kepada petani. Namun sebagaimana yang disampaikan Darodjat dalam artikelnya, langkah ini belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani. Diperlukan kebijakan subsidi yang lebih efektif, seperti subsidi harga langsung kepada petani agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari hasil panen (Darodjat, 2024).

Dalam konteks aksesibilitas dan efektivitas, BPJS pada dasarnya dipandang positif oleh petani yang telah menjadi peserta karena manfaat perlindungannya dirasakan ketika menghadapi kebutuhan kesehatan maupun risiko kerja. Meskipun demikian, keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Desa Kabuna masih belum optimal. Rendahnya aksesibilitas ini berkaitan dengan beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi terkait BPJS kepada masyarakat, keterbatasan pengetahuan mengenai manfaat dan mekanisme kepesertaan, serta skema iuran mandiri yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi petani yang

berpendapatan tidak tetap. Bagi petani dengan kondisi ekonomi pas-pasan, terlebih yang masih menghadapi beban hutang atau keterbatasan modal pertanian, besaran iuran menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan untuk mengikuti program BPJS. Karena itu, sebagian masyarakat lebih memilih mengandalkan jaminan kesehatan dari pemerintah setempat daripada mengikuti skema mandiri BPJS. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas layanan perlindungan sosial formal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kesesuaian desain kebijakan dengan realitas ekonomi masyarakat sasaran.

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi pada petani di Desa Kabuna, menjadi penting bagi lembaga asuransi sosial BPJS untuk melakukan peningkatan kepesertaan masyarakat melalui sistem "jemput bola". Hal ini dikarenakan umumnya masyarakat yang tidak mengikuti program asuransi sosial karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait jaminan perlindungan sosial. Sehingga perlu menggencarkan sosialisasi secara langsung dengan pendekatan khusus pada masyarakat. Selain itu, hal krusial lainnya adalah penting bagi BPJS untuk memberikan aksi nyata yang dapat membuat masyarakat percaya bahwa BPJS adalah lembaga resmi dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja informal di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Desa Kabuna, menghadapi tantangan yang kompleks terkait aksesibilitas dan efektivitas. Sebagian besar pekerja informal belum memanfaatkan program jaminan sosial formal seperti BPJS secara optimal, terutama karena rendahnya kesadaran, keterbatasan ekonomi, dan minimnya sosialisasi. Sebaliknya, mekanisme informal seperti gotong royong dan investasi dalam bentuk ternak tetap menjadi andalan masyarakat untuk menghadapi risiko sosial dan ekonomi. Kondisi geografis dan ekonomi di wilayah perbatasan menambah kerentanan masyarakat, termasuk ketidakpastian pendapatan akibat fluktuasi harga pasar dan ketergantungan pada kondisi alam. Meskipun terdapat upaya perlindungan sosial formal, seperti bantuan pemerintah dan program asuransi sosial, efektivitasnya masih terbatas oleh ketidaksesuaian dengan kebutuhan spesifik komunitas perbatasan. Berdasarkan hasil penelitian, penting bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk menekankan pentingnya pendekatan terpadu yang lebih inklusif dan berbasis komunitas guna meningkatkan kesejahteraan pekerja informal, serta perlunya dukungan berupa bantuan produktif untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko sosial dan ekonomi. Diperlukan upaya meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas, seperti melalui sistem "jemput bola" oleh BPJS, serta penyediaan program yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi petani. Selain itu, bantuan yang mendukung produktivitas, seperti bibit, alat pertanian, dan mesin, dinilai lebih bermanfaat daripada bantuan konsumtif.

REFERENSI

Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, P. R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Endang L Achadi, A. T., Wirawan, F., Sungkar, S., Sudarmono, P., Shankar, A. H., & Thabrany, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. *The Lancet*, *393*(10166), 75–102. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7

Badan Pusat Statistik. (2026). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2025. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 11, Number 84).

BPJS Kesehatan. (2025). Monthly Report Monitoring JKN Monthly Report Monitoring JKN. In *Monthly Report Monitoring* (Number September).

BPJS Ketenagakerjaan. (2025). *Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, Agustus Tahun 2025*.

BPS Provinsi NTT. (2025). *Profil Kemiskinan Nusa Tenggara Timur Maret 2025*. Badan Pusat Statistik.

Ginneken, W. Van. (1999). *Social Protection Concepts and Approaches: Implications for Policy and Practice in International Development. In Overseas Development Institute*. Overseas Development Institute.

Grosh, M., Ninno;, C. del, Tesliuc, E., Azedine, O., Milazzo, A., & Weigand, C. (2018). *The Design and implementation of effective safety nets*. https://www.gov.uk/government/organisations/competition-commission

Haliim, W., & Wicaksono, M. A. (2025). DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL DANA BAGI HASIL. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, *09*(02), 373–388.

International Labour Organization. (2021). *World Social Protection Report 2020–22*. ILO.

International Labour Organization. (2024). *World Social Protection Report 2024-26: Universal social protection for climate action and a just transition | International Labour Organization*. https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-social-protection-report-2024-26-universal-social-protection-climate

Istianah, & Imelda, J. D. (2021). Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *10*(02), 111–121.

Kementerian Keuangan. (2022). *Perlindungan Sosial*. Kementerian Keuangan RI.

Maksum, A., Puspitosari, W. A., & Prastiwi, J. H. (2020). Demokrasi dan Kekuasaan Adat: Potensi Eksklusi Akses Dana Desa bagi Eks Pengungsi Timor-Leste. *Society*, *8*(2), 470–485. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.154

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muchlis, K., Sellang, K., & Lukman. (2025). PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KANIE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, *9*(1), 191–207. https://doi.org/https://doi.org/10.30737/mediasosian.v9i1.6397

Muttaqien, M., Setiyaningsih, H., Aristianti, V., Selby Coleman, H. L., Hidayat, M. S., Dhanalvin, E., Siregar, D. R., Mukti, A. G., & Kok, M. O. (2021). Why did informal sector workers stop paying for health insurance in Indonesia? Exploring enrollees' ability and willingness to pay. *PLoS ONE*, *16*(6 June), 1–19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252708

Ngadi, N., Asiati, D., Nurul Aini, Y., Astrelina Purba, Y., & Rajagukguk, Z. (2025). Increasing labor social security membership for informal workers in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *11*(1), 1–16. https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2534139

Perkasa, V. D., Dewangga, R. I., & Azzahra, S. (2024). *Understanding the Cultural Poverty Profile of Ex-East Timorese Refugee Communities in the Border Areas of East Nusa Tenggara*. Kbm.Pasca.Ugm. https://kbm.pasca.ugm.ac.id/en/understanding-the-cultural-poverty-profile-of-ex-east-timorese-refugee-communities-in-the-border-areas-of-east-nusa-tenggara-part-1/

Putri, H. (2024). Penerapan Modul Pengasuhan Dan Pendidikan Anak Pada Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, *8*(1), 48–61. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v8i1.5478

Surtiari, G. A. K., Wannewitz, M., Prasetyoputra, P., Hadumaon Siagian, T., & Garschagen, M. (2024). Indonesia's social protection system: the relevance of informal social protection to strengthen adaptation to climate change. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, *21*(1). https://doi.org/10.1080/1943815X.2024.2375995

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on

Poverty: An Estimation for Indonesia. In *Smeru Working Paper*. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_covid19impact_draft.pdf

Syahyuti. (2018). Peran kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, *36*(1), 1–18.

Undang-Undang Nomor 24 Tentang BPJS (2011).

Warham, S. S., & Lestari, J. D. (2025). Gotong Royong Sebagai Modal Sosial Ekonomi Studi Pada Komunitas Pedagang Di Pasar Sentral Palopo. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *8*(2), 114–121.

42-54_plagiasi.docx

ORIGINALITY REPORT

13%	12%	6%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.scribd.com Internet Source	2%
2	media.neliti.com Internet Source	1%
3	ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source	1%
4	www.turc.or.id Internet Source	1%
5	ejournal.undip.ac.id Internet Source	1%
6	www.jamsosindonesia.com Internet Source	1%
7	jurnal.uf.ac.id Internet Source	<1%
8	www.asatunews.co.id Internet Source	<1%
9	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
10	repositori.usu.ac.id:8080 Internet Source	<1%
11	journalpedia.com Internet Source	<1%
12	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1%
13	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
	paradigmabangsa.com	

14	Internet Source	<1 %
15	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
16	Christmas Prasetia Ate, Selfiana T. M. Ndapa Lawa. "Pergeseran Bahasa Tetun Fehan dalam Ranah Keluarga pada Guyub Tutur Masyarakat Belu di Wilayah di Wilayah Perbatasan RI - RDTL", SeBaSa, 2022 Publication	<1 %
17	Rita Fuzi Lestari. "Transformasi Paradigma Baru Administrasi Negara: Gagasan dan Pemikiran Seorang Warga Negara Senior", Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2025 Publication	<1 %
18	fdocuments.net Internet Source	<1 %
19	www.frontiersin.org Internet Source	<1 %
20	Reinhard F Tuhumury, Leunard O Kakisina, Felecia P Adam. "PERAN DAN KONTRIBUSI PEREMPUAN PAPALELE IKAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI DUSUN SERI NEGERI URIMESSING KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON", Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan, 2024 Publication	<1 %
21	Sutriyono Sutriyono, Johan Setianto. "Pendapatan Pedagang Ayam Kampung Pada Pasar Tradisional Di Kota Bengkulu", Jurnal Sain Peternakan Indonesia, 2019 Publication	<1 %
22	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %

23	apps.mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
24	docs.wfp.org Internet Source	<1 %
25	jurnal.upnyk.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.unwira.ac.id Internet Source	<1 %
27	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
28	aunilo.uum.edu.my Internet Source	<1 %
29	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	<1 %
30	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
31	fahmigeoui.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	jurnal.jkp-bali.com Internet Source	<1 %
33	kumpulandesainrumahminimalis.info Internet Source	<1 %
34	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
35	rafsanformath.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	rdiglobal.org Internet Source	<1 %
37	repositorio.idp.edu.br Internet Source	<1 %
38	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %

39	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
40	risalahalifham.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
42	www.tangerangnews.com Internet Source	<1 %
43	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
44	Ismatut Thobibah, Ernawaty Ernawaty, Nyoman Anita Damayanti. "Analisis Faktor Penentu Kepesertaan Bpjs", Jurnal Keperawatan Silampari, 2020 Publication	<1 %
45	Siena Caridi-Ross, Zahid Mumtaz. "A hybrid classification approach for exploring Iraq's welfare regime", Journal of International and Comparative Social Policy, 2025 Publication	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		